

**Membangun**

**EPISTEMOLOGI EKONOMI ISLAM:**

**IKHTIAR MENJADIKAN ISLAM SEBAGAI SISTEM EKONOMI ALTERNATIF**



Oleh: Pradana Boy ZTF dan Hendra Suwardana



### Pra Wacana

Dominasi sistem ekonomi kapitalis hampir di seluruh wilayah dunia ini, dalam banyak hal telah menimbulkan respon yang cukup keras dari ideologi-ideologi dunia lainnya. Ketika sistem ekonomi sosialis masih kokoh berdiri yang ditandai dengan berdirinya negara Komunis Uni Soviet, kapitalisme sebagai sebuah ideologi ekonomi dominan dunia, memiliki dua musuh besar yang dapat memperkuat kesatuan hegemoninya. Karena di samping sosialisme, Islam juga dirasakan oleh Barat sebagai suatu ancaman tersendiri. Ketika sosialisme runtuh dan bipolaritas Barat-Timur dalam bidang peradaban atau Utara-Selatan dalam konteks ekonomi-politik mulai agak kabur, -tulis Bassam Tibi-, Barat berkepentingan untuk menciptakan musuh baru yang dapat mempersatukan kekuatan mereka. Praktis, musuh tersebut tidak lain adalah Islam (Tibi, 1999).

Dengan sendirinya, dalam bidang ekonomi, Islam telah dirasakan oleh Barat sebagai ancaman hegemoni ekonominya. Menanggapi persoalan ini, Islam semestinya menciptakan suatu sistem ekonomi sendiri yang tidak sekadar mengadopsi sistem-sistem ekonomi konvensional yang telah didominasi oleh faham-faham kapitalisme yang dalam banyak hal telah mengingkari hakikat kemanusiaan, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan sebuah kerangka etis praktek dan pemikiran ekonomi tersendiri yang dilandaskan pada ajaran Islam.

Menciptakan rancang bangun teori ekonomi Islam, sebenarnya merupakan pekerjaan yang teramat berat. Satu hal yang harus disadari bersama adalah bahwa sebuah Islamisasi ekonomi, pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan munculnya Islamisasi pengetahuan selama beberapa dasa warsa terakhir ini. Karena jelas, bahwa ilmu ekonomi modern yang saat ini mendominasi hampir seluruh dimensi praktek perekonomian dunia, adalah bagian integral dari ilmu pengetahuan modern.

Tapi alih-alih mampu menciptakan sistem ekonomi alternatif itu, dalam banyak hal dan tanpa disadari, Islam justru memperkuat sistem ekonomi kapitalis itu. A. Tony Prasentiantono dalam satu tulisannya yang menyoroti tentang gejala globalisasi ekonomi, menyiratkan adanya dilema yang harus dihadapi oleh umat Islam berkaitan dengan kondisi ini. Bahwa menjadi bagian dari struktur masyarakat global, merupakan satu kemutlakan (*necessity*) bagi umat Islam. Tetapi pada titik inilah kemudian dilema itu muncul, menjadi bagian dari masyarakat global dalam bidang ekonomi, khususnya, sama dengan memperkuat sistem kapitalisme (Prasentiantono, 2001). Karena, seperti yang disinyalir oleh Adam Przeworski, produk-produk kapitalisme, telah menjadi semacam unsur kemakmuran universal (Przeworski, 1997), sehingga masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga, yang sebagian besar dihuni oleh umat Islam, praktis tidak bisa menghindari gelombang ini. Padahal, tulis Tony lebih lanjut, ketika orang lebih suka membeli apel Australia daripada apel Malang, ketika orang lebih suka memakai baju Hughoboss daripada baju Kenso, sebenarnya secara ekonomi hal ini merugikan. Dalam situasi ekonomi, kondisi ini disebut dengan *zero sum game*, ada yang menang ada yang kalah. Ketika orang di Indonesia menggunakan Microsoft, dengan sendirinya orang Indonesia telah membayar royalti kepada Bill Gates, artinya kita kalah dalam memperoleh modal sektor jasa komputer, dan begitu seterusnya (Tony, 2001).

Praktis, Islamisasi ekonomi sebenarnya harus dimulai dengan sebuah pertanyaan mendasar: Apakah ilmu pengetahuan (termasuk ilmu ekonomi) bebas nilai ataukah tidak? Pertanyaan ini menjadi penting karena jawaban "ya" dan "tidak" sama-sama mengandung konsekuensi. Jika kita percaya pada teori yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, maka Islamisasi

ekonomi itu hanya terjadi pada wilayah aksiologis. Karena menurut teori ini bahwa sekapitalis apapun teori ekonomi itu, jika dipraktekkan oleh pribadi-pribadi muslim, maka dengan sendirinya akan menjadi ekonomi Islam. Pandangan seperti ini tampaknya terlalu simplistis dan menganggap ilmu pengetahuan sebagai sebuah "barang mati" yang tidak mengandung nilai apa-apa. Padahal lahirnya sebuah konsep pengetahuan, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari konstruksi nilai yang berlangsung di tengah masyarakat. Dalam sosiologi pengetahuan, teori Hegel seringkali ditunjukkan untuk memertajam analisa ini, bahwa sebuah pengetahuan terbentuk karena adanya proses dialektika yang melibatkan tesis-antitesis-sintesis. Dengan kata lain, paradigma berfikir Hegelian, menyepakati bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai.

Meskipun begitu, Islamisasi ilmu bukan tidak mengandung masalah, karena tidak semua tokoh ilmuwan muslim memberikan apresiasi positif-konstruktif terhadap gagasan Islamisasi yang dipelopori, antara lain, oleh Ismail Raji al-Faruqi, Naquib al-Attas, dan Ziauddin Sardar. Fazlur Rahman, misalnya, adalah representasi ilmuwan muslim yang secara tegas menolak gagasan Islamisasi ilmu itu. Baginya, daripada membuang-buang waktu melakukan Islamisasi, lebih baik umat Islam memanfaatkan energi dan sumber material yang dimilikinya untuk berkreasi seperti yang telah dirintis oleh para filsuf besar (Rahman, 1988).

Senada dengan Rahman, tokoh ilmuwan muslim yang lain, Pervez Hoodbhoy, menyatakan keraguanannya seperti terungkap dalam bukunya, *Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality* (1992). Baginya, ilmu Islam merupakan sesuatu yang mustahil diadakan, sebagaimana kemustahilan mengadakan ilmu Marxis.

Karena itu, ada baiknya mempertimbangkan teori lainnya, yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai, artinya lahirnya sebuah *episteme* keilmuan, sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari lingkup

zaman yang melingkarinya. Dalam bahasa sosiologi pengetahuan, seringkali dikatakan bahwa sebuah ilmu pengetahuan lahir karena adanya, atau sangat dipengaruhi oleh konstruk sosial, sehingga seluruh ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki sifat *socially constructed*. Jika teori ini benar, artinya ilmu penge-

Islamisasi pengetahuan,  
termasuk Islamisasi ekonomi,  
sebenarnya harus dimulai  
dengan membangun sebuah  
kerangka epistemologi ekonomi  
Islam, sehingga, idealisme  
ekonomi Islam yang dicita-  
citakan tidak sekadar  
merupakan *labeling* (pelabelan)  
terhadap bangunan teori  
ekonomi konvensional dengan  
ayat-ayat al-Qur'an, dan atau  
simbolisasi Islam yang lain.

tahuan sebenarnya sarat dengan nilai. Sejarah telah membuktikan hal ini, pasca Renaisans di Eropa muncul istilah *The Myth of the Bad Scientist* (Mitos Ilmuwan Durhaka), yang merujuk kepada ilmuwan yang terkooptasi oleh penguasa dan menjadi alat penguasa untuk melanggengkan dan memperluas wilayah hegemoninya. Karena itu, Islamisasi ekonomi harus dilakukan dalam wilayah epistemologi dan ontologi.

Tulisan ini berangkat dari pemahaman bahwa ilmu pengetahuan adalah entitas yang tidak bebas nilai (*value-free*), karena itu Islamisasi

pengetahuan, termasuk Islamisasi ekonomi, sebenarnya harus dimulai dengan membangun sebuah kerangka epistemologi ekonomi Islam, sehingga, idealisme ekonomi Islam yang dicita-citakan tidak sekadar merupakan *labeling* (pelabelan) terhadap bangunan teori ekonomi konvensional dengan ayat-ayat al-Qur'an, dan atau simbolisasi Islam yang lain.

### Persoalan Fundamental Ekonomi Islam

Ini adalah persoalannya, jika dihadapkan pada tantangan untuk membangun sistem epistemologi ekonomi Islam, maka umat Islam cenderung lemah. Betul bahwa rancang bangun ontologis ekonomi Islam dalam bentuk teks-teks Qur'an dan Sunnah sudah sangat ideal. Tetapi teks-teks ideal itu kemudian tidak akan bermakna apa-apa jika tidak diwujudkan dalam bangunan-bangunan teori yang praksis dan bersifat aktual. Di sinilah kita melihat ada jarak yang cukup jauh antara konsep ontologis ekonomi Islam dengan praktek aksiologis di kalangan umat Islam sehari-hari. Adalah satu hal yang wajar, jika antara konsep yang ideal dengan praktek yang aktual, terjadi distorsi, karena wilayah-wilayah konseptual, ketika diterjemahkan dalam aksi praksis seringkali mengalami dialektika dengan kondisi-kondisi obyektif di sekitarnya. Tetapi yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana mengeliminasi distorsi antara konsep dan praktek itu, atau dalam bahasa filsafat adalah antara ontologi dan aksiologi. Di sinilah kemudian perlunya membangun konstruk epistemologi ekonomi Islam yang kokoh. Karena dengan bahasa yang sederhana, epistemologi, pada dasarnya merupakan strategi untuk menjembatani distorsi yang sangat mungkin terjadi antara wilayah ontologi dan wilayah aksiologi. Dengan kata lain, rancang bangun epistemologi ekonomi Islam, sebenarnya masih sangat rapuh.

Kuntowijoyo, ketika mengelaborasi konsep epistemologi Islam, menyatakan bahwa epis-

temologi Islam adalah epistemologi relasional. Artinya, epistemologi Islam didasarkan pada semangat *tawhid* dan bermuara kepada *tawhid* (Kuntowijoyo, 1997). Konstruk semacam ini, tentu sangat global dan terlampau abstrak, maka dalam bahasa yang sederhana bisa dijabarkan bahwa konsep *tawhid* ini berarti bahwa tujuan manusia hidup adalah menyembah dan mengabdikan kepada Tuhan. Lebih jauh, sistem *tawhid* yang semacam ini juga mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam banyak sekali ayat, sering dijelaskan bahwa iman, yaitu keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris, selalu dikaitkan dengan amal, yaitu perbuatan atau tindakan nyata manusia; keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Kuntowijoyo, 1991). Dalam kaitannya dengan ekonomi, pusat dari perintah zakat—misalnya—adalah iman, adalah keyakinan kepada Tuhan, tetapi bermuara pada terciptanya keadilan sosial. Konsep teosentrisme manusia bersifat humanistik, sehingga nilai inti seluruh ajaran Islam adalah humanisme teosentris (ibid), artinya, amal yang didasarkan pada nilai-nilai *tawhid* dan berimplikasi pada kehidupan manusia.

Praktek dan pemikiran ekonomi Islam, harus diakui masih sering melakukan simplifikasi terhadap teori-teori ekonomi konvensional sebagai konsep yang paralel dengan al-Qur'an. Usaha semacam ini bukan tidak berguna, tetapi mendasarkan Islamisasi ekonomi hanya pada persoalan pelabelan atau paralelisasi semacam itu, hanya akan menjadikan hilangnya nilai-nilai humanisme-teosentris yang menjadi semangat utama dalam epistemologi ekonomi Islam yang dicita-citakan. Karena itu, hilangnya nilai humanisme-teosentris atau humanisme transendental ini, tak pelak menjadi salah satu sebab rapuhnya epistemologi ekonomi Islam.

Akibat rapuhnya epistemologi ekonomi Islam itu, maka berbagai konsepsi ekonomi Islam

Praktek dan pemikiran ekonomi Islam, harus diakui masih sering melakukan simplifikasi terhadap teori-teori ekonomi konvensional sebagai konsep yang paralel dengan al-Qur'an. Usaha semacam ini bukan tidak berguna, tetapi mendasarkan Islamisasi ekonomi hanya pada persoalan pelabelan atau paralelisasi semacam itu, hanya akan menjadikan hilangnya nilai-nilai humanisme-teosentris yang menjadi semangat utama dalam epistemologi ekonomi Islam

yang ditawarkan mengesankan "jauh panggung" beberapa kritik yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan persoalan rancang bangun epistemologi ekonomi Islam adalah bahwa ekonomi Islam yang dicita-citakan itu masih mengandung sifat-sifat: (1) normatif-konseptual; (2) apologetik; dan (3) subyektif-parsial. Normatif-konseptual adalah bahwa keinginan untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi alternatif, kadang-kadang hanya diformulasikan dalam konsep yang normatif dan abstrak. Beberapa tulisan Yusuf Qardhawi tentang ekonomi Islam, sebenarnya dapat dikompilkan kepada wilayah ini. Di samping itu, munculnya sistem ekonomi Islam, terkesan cenderung sebagai apologi umat Islam terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, di mana yang satu ekstrem individu, sementara yang lain ekstrem negara. Lebih jauh, apologi itu biasanya dihubungkan dengan kondisi historis, bahwa pada masa kejayaannya, Islam pernah memiliki sistem ekonomi sendiri, yang jauh lebih baik dari sistem ekonomi konvensional yang saat ini tengah berlangsung. Bukan tidak penting merujuk kepada warisan sejarah masa lalu, tetapi menjadikan kenyataan itu sebagai satu-satunya "senjata" tentang keunggulan Islam, justru akan melahirkan sikap romantisisme masa lalu yang berlebihan di kalangan umat Islam. Sementara kedua hal itu juga berkelindan dengan kenyataan bahwa hampir seluruh tawaran tentang sistem

ekonomi Islam sebagai suatu sistem alternatif, bersifat subyektif dan parsial. Artinya, sebagian besar pendapat itu tidak disandarkan pada sebuah metodologi universal yang memungkinkan kita untuk melihat seluruh kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang tengah terjadi dengan kerangka metodologis yang universal itu.

Berangkat dari kritik di atas, ekonomi Islam yang dicita-citakan bersama itu mestinya mulai mengubah orientasi gerakannya, dari yang semula normatif-konseptual menjadi praksis-aktual, dari apologetik menjadi kritis dan rekonstruktif, dan dari subyektif-parsial menjadi obyektif-universal. Lagi-lagi, ini tentu bukan pekerjaan mudah. Tetapi setidaknya-tidaknya beberapa contoh telah diberikan oleh sejumlah ekonom Islam. Seperti yang dikatakan oleh Kuntowijoyo (1997: 139) dengan mengutip Raihan M. Sharif bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem yang tidak sepenuhnya memihak kepada negara, di satu sisi, atau terlalu memihak kepentingan individu di sisi yang lain. Juga ekonomi Islam bukanlah untuk menjadikan manusia sebagai semata-mata "mesin produksi" tetapi justru manusialah yang akan menjadi "wali" dalam setiap kegiatan produksi. Secara lebih sederhana, formulasi yang ditawarkan oleh Raihan M. Sharif adalah, bahwa ekonomi Islam didasarkan pada: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *limited private property* (pembatasan kepemilikan pribadi); (3) *co-operation* (kerja sama); dan (4) *state enterprise*

(perusahaan negara), bahwa unit-unit produksi tertentu yang membawahi kehidupan orang banyak harus dikuasai oleh negara, sehingga mencegah terjadinya monopoli, ologopoli dan monopsoni (Kuntowijoyo, 1997).

Rumusan lainnya, bisa dilakukan dengan mengadopsi teori Arkoun tentang proses dialektika al-Qur'an dengan realitas sosial. Arkoun menggambarkan dialektika itu dalam bagan sebagai berikut:

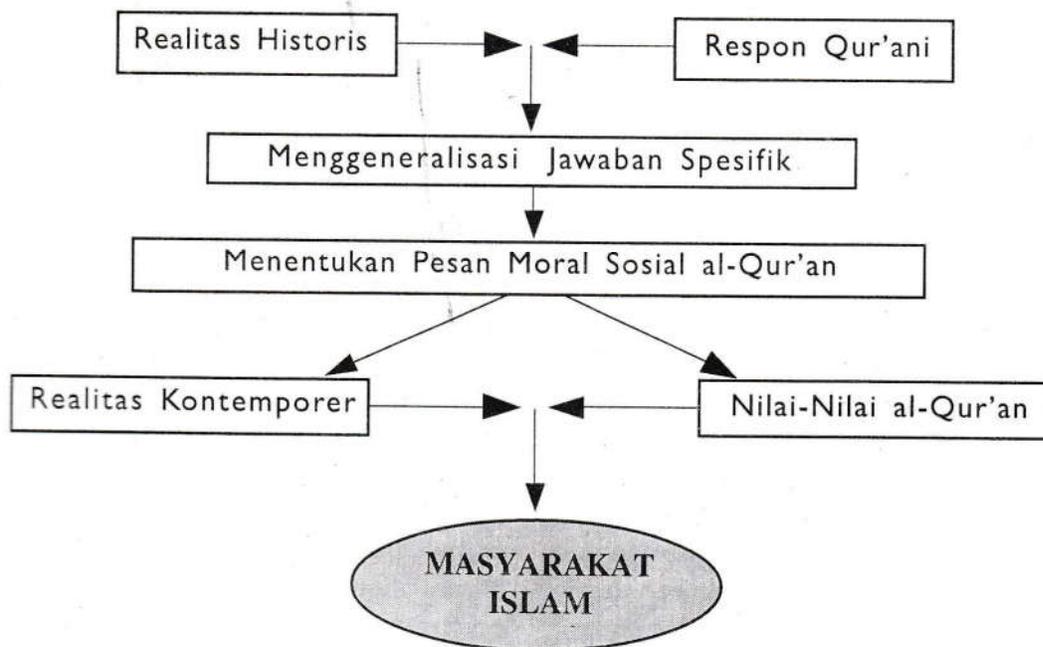
Satu hal yang patut disadari bersama, membangun sistem ekonomi Islam, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Gambaran di atas adalah dilema dan tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam untuk menciptakan sistem ekonomi alternatif itu. *Trial and error*; tentu masih akan terus terjadi. Dan sampai di manakah "kekuatan" kita untuk melakukan *trial and error* itu, akan menjadi faktor yang sangat menentukan.

**Etika Ekonomi dalam Islam**

Nabi Muhammad SAW diutus, tiada lain

untuk menyempurnakan akhlaq manusia di muka bumi ini. Maka, semua aturan agama yang berkaitan dengan harta benda, tidak lepas dari unsur menegakkan nilai-nilai luhur dan mencegah kemerosotan moral akal budi manusia. Bahkan soal ekonomi dalam Islam bukan sekadar berkaitan dengan unsur moral, tetapi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga erat hubungannya dengan ketakwaan kepada Tuhan.

Beberapa ayat al-Qur'an menjelaskan hal ini, di antaranya ialah ayat-ayat dalam surat Nuh yang menjelaskan adanya hubungan antara *istighfar* dengan melimpahnya rizki (Q.S: Nuh; 10-13). Kebalikannya, berarti terdapat kaitan antara perbuatan makar (maksiat) dengan ketidaklancaran rizki. Dalam salah satu hadits dijelaskan bahwa di antara dosa-dosa, ada dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh shalat puasa, zakat, dan haji, tetapi harus dihapus dengan kesungguhan mencari nafkah (H.R.Tabrani dan Abu Nu'a'im). Oleh karena itu, Allah mensyari'atkan sholat *istisqa'* (minta hujan), yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, ketika suatu masyarakat



diyakini. Dalam sholat ini semua orang dianjurkan untuk membaca istighfar.

Keterkaitan ekonomi dengan masalah moral dan spiritual ini, bahkan sampai mempengaruhi pandangan tentang nilai suatu benda. Nilai (*value* atau *price*) merupakan pembahasan utama ilmu ekonomi, bahkan ada yang meyakini bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang nilai secara ekonomis, baik nilai guna (*value in use*) maupun nilai tukar (*exchange value*) sepenuhnya bersifat materi. Tetapi dalam ekonomi Islam, nilai juga dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat immaterial (*ma'nawi*), misalnya unsur berkah. Dalam sebuah hadist, Nabi SAW bersabda: "Penjual dan pembeli berhak untuk membatalkan jual belinya selama belum berpisah. Jika mereka jujur dan berterus-terang, maka jual beli itu akan membawa berkah" (H.R. Bukhori Muslim). Berkah artinya tumbuh dan bertambahnya ke arah kebaikan. Dalam hadist ini, nilai keuntungan seorang pedagang bukan sekadar dilihat secara materi, tetapi nilai keuntungan yang diraih secara tidak benar dianggap tidak benar dan karena itu ia bernilai rendah sekalipun secara materi bernilai tinggi. Hadist ini menetapkan adanya unsur berkah yang immaterial itu, karena berkah artinya tumbuh dan bertambahnya kebaikan. Keuntungan yang tidak berkah karena diraih dengan cara yang tidak halal nilainya akan berkurang sekalipun secara materi bernilai tinggi.

Secara teori memasukkan unsur berkah ini dapat dirasakan. Semisal, bila kekayaan

didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka ia berarti telah meraih keuntungan dengan cara yang mudah dan itu tidak seimbang dengan modal, baik material maupun moral yang diberikan. Keuntungan yang diraih dengan mudah ini biasanya akan mudah pula dibelanjakan kemana saja, terutama disalurkan pada hal-hal yang menyimpang dari moralitas dan etika, seperti untuk menyuap. Dengan mempermudah pemberian suap misalnya, berarti seseorang mempunyai andil besar dalam membudayakan penyelewangan ini, sebab tanpa dipermudah pun manusia cenderung menuruti nafsu jahatnya.

Meluasnya perilaku immoral sangat berbahaya bagi kehidupan sosial ekonomi bahkan politik. Maka di sinilah, soal ada atau terhapusnya berkah dapat dirasakan. Melekatnya unsur moral dan spiritual pada kaidah-kaidah ekonomi ini dimaksudkan untuk mencapai sebuah tatanan yang seimbang. Karena di manapun tujuan ekonomi adalah untuk mensejahterakan manusia. Kesejahteraan itu tentu sulit dicapai tanpa adanya tatanan yang seimbang dan sesuai dengan fitrah manusia. Di mana terdapat di dalam dirinya kecintaan terhadap harta dan juga kecintaan terhadap kebaikan. Hukum keseimbangan ini memang menjadi ketentuan Tuhan (*sunnatullah*) dalam mengatur semua makhluknya.

Semua aspek kehidupan yang diwarnai oleh unsur moral dan etika itulah yang dikehendaki oleh ajaran-ajaran agama. Ekonomi bermoral, kebudayaan bermoral, politik bermoral bahkan

Melekatnya unsur moral dan spiritual pada kaidah-kaidah ekonomi ini dimaksudkan untuk mencapai sebuah tatanan yang seimbang. Karena di manapun tujuan ekonomi adalah untuk mensejahterakan manusia. Kesejahteraan itu tentu sulit dicapai tanpa adanya tatanan yang seimbang dan sesuai dengan fitrah manusia. Di mana terdapat di dalam dirinya kecintaan terhadap harta dan juga kecintaan terhadap kebaikan

perang pun tidak lepas dari muatan-muatan nilai moralitas. Agama juga telah memasukkan nilai-nilai tertentu ke dalam etika ekonomi secara khusus. Semisal, anggapan kotor (*khabits*) terhadap jenis makanan atau barang tertentu sehingga tidak boleh diproduksi, dikonsumsi atau dijual-belikan. Namun, secara umum tidak ada perbedaan moral dan etika yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai nilai yang sama. Jujur adalah tindakan terpuji dan curang adalah tindakan tercela, baik hal ini dilakukan dalam dunia bisnis, politik atau permainan sepak bola. Tapi, barangkali perlu diperhatikan bahwa komitmen seseorang untuk menegakkan moral dalam kehidupan ekonomi akan terasa berat daripada ketika ia bertindak sebagai pelaku ekonomi. Sehingga, dalam satu cabang kehidupan ini nilai-nilai moral sulit untuk tersosialisasikan.

Setidaknya ada tiga penyebab penting dalam hal ini. *Pertama*, kesenjangan antara sistem ekonomi yang berlaku dengan norma-norma agama yang diyakini masyarakat Muslim. Ekonomi pasar yang mendominasi ini adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada falsafah kebebasan individu, yang dalam tingkat masyarakat diaplikasikan menjadi nilai-nilai dasar demokrasi. Karena itu, teori-teori dirumuskan tidak terlepas dari rasionaitas individu yang bebas untuk menafsirkan segala hal. Perilaku ekonomi apapun dianggap syah dan legal selama tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan dan etika demokrasi. Sementara pada masyarakat Muslim berlaku nilai-nilai yang tidak berasaskan kebebasan, melainkan berpijak pada akidah dan konsep dasar manusia atau harta. Sehingga, kadang-kadang harus dikorbankan, karena tuntutan akidah dan konsep dasar tadi. Lebih dari itu, Islam menganggap bahwa mengorbankan kebebasan demi perintah Tuhan adalah kebebasan yang sejati, karena hanya patuh pada Tuhannya dan tidak mematuhi atau dikendalikan hawa nafsunya.

Dalam keadaan seperti ini nilai-nilai moral bukan hanya sekadar dari kaidah-kaidah ekonomi, tetapi kadang-kadang bertolak belakang dengannya. Dalam kondisi paradoksial, moral menjadi mudah terabaikan. Sebab, ia hanya bisa seperti rambu-rambu jalan di tengah lalu-lintas yang sunyi dan tidak dijaga polisi. Mematuhi rambu-rambu tersebut, dianggap para pengendara mobil hanya menghambat perjalanan saja. Sebab, dilarangpun tidak membawa resiko menurut perasaan mereka. Langkah yang selama ini dilakukan masyarakat Muslim dalam menghadapi keadaan diatas ialah dengan merumuskan sistem ekonomi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi langkah ini belum diimbangi oleh para ulama' Islam dengan merumuskan sistem pendidikan agama yang menyentuh pendidikan ekonomi. Dalam arti, perlu adanya penafsiran ekonomi atas beberapa nash-nash agama seperti dijelaskan tentang nilai berkah yang disebutkan diatas. Sehingga ulama' bukan hanya sekadar sebagai pengawas tetap, tapi juga sebagai pendorong berlakunya sistem ekonomi yang telah dirumuskan.

Hal ini tentunya menuntut peran serta ulama, sedikit banyak juga mempunyai pengetahuan tentang ekonomi. Semisal, perlunya kepedulian ulama terhadap soal ekonomi. Salah satu bukti yang ini memerlukan peran mereka adalah bagaimana nasib bangsa ini menghadapi perdagangan bebas AFTA (*Asian Free Trade Area*) yang akan diberlakukan per 1 Januari 2003 ? Kita juga sangat memerlukan pertanyaan ulama'; sudah siapkah kita mensyukuri nikmat-nimat Tuhan? Syukur dalam arti memperlakukan pemberian Tuhan sesuai dengan perintahnya. Bukan sekadar dapat mempertahankan suatu pemberian Tuhan, tetapi juga sebagai cara untuk menambah pemberian Tuhan (QS: Ibrahim; 7). Sehingga, ada hukum kausal antara perbuatan syukur dan tingkat kemakmuran masyarakat Muslim. Maka,

perumbuhan ekonomi yang sementara ini kita nikmati, tidak perlu dicemaskan, selama kita dapat memenuhinya. Sebaliknya, kalau nikmat Tuhan ini banyak kita selewengkan, maka tanpa menunggu ancaman perdagangan bebas pun nikmat tersebut akan menjadi bumerang yang memantapkan.

*Kedua*, konflik kepentingan (*vested interest*) antara para pelaku ekonomi. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang berbeda kepentingan. Perbedaan kepentingan ini telah diuraikan oleh pendidikan ekonomi modern menjadi konflik antar kepentingan. *Selanjutnya*, konsep dasar ekonomi ialah kelangkaan sumber daya. Hubungan antara pelaku ekonomi yang berdasarkan konflik kepentingan ini, mengakibatkan munculnya gejala egoisme dalam berbagai perilaku ekonomi. Semisal, serikat buruh, didirikan untuk menghadapi kelompok pengusaha, asosiasi konsumen untuk menghadapi asosiasi produsen atau sebaliknya. Dan begitulah seterusnya konflik demi konflik antar berbagai kekuatan sampai kekuatan yang ada menjadi berimbang. Bagi kelompok yang tidak dapat menyusun kekuatan seperti petani, maka posisi mereka akan terus tertinggal. Akan tetapi, dalam kenyataannya kekuatan yang berimbang itu, khususnya di negara-negara berkembang merupakan angan-angan yang sulit diwujudkan.

Untuk mengatasi keadaan ini bank Islam mengambil langkah-langkah preventif di antaranya; *pertama*, permohonan kredit dimohon menyematkan jaminan (agunan) yang tinggi melebihi yang berlaku pada bank konvensional, sebagai bukti

bahwa ia memiliki modal yang kuat dan likuiditasnya dapat diandalkan. *Kedua*, bank Islam mematok laba yang tinggi melebihi bunga konvensional agar diharapkan dapat mengurangi kerugian, bila terjadi kredit macet. Hanya sikap bank ini seperti makan buah simalakama. Dan langkah-langkah ini jelas merugikan bank-bank Islam sendiri. Sebab, masyarakat tahu kalau kredit bank Islam membutuhkan biaya tinggi dan hanya bermodal besar yang mampu membayarnya. Akibatnya, bank Islam menjadi sulit kompetitif

dalam dunia perbankan, di samping misi pemerataan kesempatan dan pendapatan menjadi terbelengket. Penyelesaian terbaik untuk menghindari kredit macet ini, tentunya dengan menjauhkan atau minimal menekan angka kredit *murabaha* dan *ba'i bil tsatnaman al-ajil* dari produk bank-bank Islam. Apabila hal ini masih sulit dilakukan, menurut direk-

Hubungan antara pelaku ekonomi yang berdasarkan konflik kepentingan ini, mengakibatkan munculnya gejala egoisme dalam berbagai perilaku ekonomi. Semisal, serikat buruh, didirikan untuk menghadapi kelompok pengusaha, asosiasi konsumen untuk menghadapi asosiasi produsen atau sebaliknya.

tur pusat pengkajian ekonomi Islam King Abdul Aziz Jeddah, Dr. Mohammad al-Qoriy, perlu ditetapkan sanksi bagi penunggak kredit dalam bentuk denda (*gharamah*) yang tidak dimanfaatkan oleh bank Islam. Sebab, jika demikian berarti riba akan tetap disalurkan pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sanksi bagi penunggak memang diperbolehkan dalam syari'ah, asalkan penunggak memang mampu untuk melunasi hutangnya, dalam waktu yang telah ia sanggupi. Persoalannya, lantas siapakah yang menetapkan kemampuan atau ketidakmampuan penunggak? Kalau hal ini ditetapkan lewat pengadilan tentu memakan waktu dan biaya. Dalam menghadapi persoalan ini perlu adanya upaya menanamkan rasa kebutuhan terhadap

kebersamaan dalam setiap perilaku ekonomi. Dalam arti, menanamkan adalah menguntungkan orang lain, yang berarti memperkuat diri sendiri. Sebaliknya, merugikan orang lain sama saja dengan menghancurkan diri sendiri. Hal inilah yang diisyaratkan oleh al Qur'an ketika menyebutkan harta orang lain yang tidak boleh diganggu dengan kalimat "*amwalukum*" yang seolah-olah berarti harta kita sendiri. Keyakinan seperti ini sangat penting, sebab apapun bentuk kerja sama kalau tidak disadari oleh keyakinan seperti di atas, maka yang terjadi adalah eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

*Ketiga*, perbedaan tuntutan moral dan ekonomi. Antara tuntutan moral dan kebutuhan ekonomi sering tidak searah. Ekonomi menuntut diperolehnya keuntungan materi sebanyak-banyaknya dengan moral sekecil-kecilnya. Sementara moral justru sering menuntut seseorang untuk berkorban. Siapapun orangnya tentu tidak keberatan untuk berlaku jujur, jika kejujuran ini tidak mengundang resiko baginya. Tetapi, gara-gara kejujuran seorang pedagang menjadi berkurang, karena dunia periklanan sekarang menuntut adanya promosi yang lebih-lebihkan, maka jujur di sini menjadi sangat sulit dilakukan. Pada mayoritas perilaku ekonomi, ketahanan moral seseorang harus berhadapan dengan kemilau dunia dan manisnya harta. Dan dalam keadaan seperti ini kataatan seseorang beragama pun belum tentu dapat menjamin kredibilitas moralnya.

Kasus beberapa perusahaan investasi di Mesir (*syarikat Taudhif al-amwal*) dapat dijadikan contoh. Perusahaan-perusahaan yang tadinya dikelola secara Islami dan dipimpin oleh orang-orang yang selalu menempatkan simbol-simbol moral ke-Islaman, ternyata setelah dapat mengeruk dana miliaran *pound* dari masyarakat, dana tersebut lebih banyak digunakan bermain spekulasi dipasar-pasar uang internasional, karena tergiur keuntungan yang cepat dan mudah. Permainan yang mirip judi ini, mengakibatkan kalahnya perusa-

haan-perusahaan tersebut yang sebenarnya menjadi tumpuhan masyarakat dalam menginvestasikan uangnya. Uang dan harta memang dapat dijadikan barometer akhlaq seseorang, karena disiplin moral dalam urusan ini, ternyata lebih berat daripada disiplin menjalankan ibadah biasa. Kendati ibadah juga punya akses memperbaiki moralitas (QS. al Ankabut; 45). Kholifah Umar Bin Khaththab dalam sebuah persidangan pernah menolak *tazkiah* (rekomendasi kelakuan baik) yang diberikan pada seorang saksi, karena pemberi *tazkiah* ternyata hanya mengenal saksi itu dari segi ibadahnya saja dan belum pernah terlibat urusan bisnisnya.

Upaya untuk menegakkan tuntutan moral memang lebih banyak berpulang kepada masing-masing individu, tetapi satu hal yang sangat membantu dalam urusan ini adalah pengentasan kemiskinan, apalagi kalau berhadapan secara mencolok dengan kemewahan, jelas potensial untuk menimbulkan penyimpangan moral seseorang yang kebutuhan pokoknya saja tidak gampang terpenuhi. Sementara mau tidak mau, ia harus menonton kemewahan baik secara langsung atau melalui media massa. Maka "sangat wajar", ia merasa resah dan keresahan ini dapat dilampiaskan dengan tindakan menghalalkan segala cara. Di dalam bus kota yang sangat berjubel orang misalnya, sulit untuk melihat wajah ramah atau mendengar kata-kata yang halus. Kepedulian atau kasih sayang terhadap sesama hampir tergilas oleh dahsyatnya berebut tempat berpijak.

Percuma saja tulisan di atas kursi yang menunjukkan tempat itu diperuntukkan buat mereka yang berlanjut usia. Tidak jauh berbeda keadaan kawasan-kawasan miskin di tengah-tengah pasar kota besar. Dan tidak berbeda pula kondisi negara-negara miskin yang kebetulan banyak dari negara-negara muslim. Maka barangkali, ada benarnya kalau seorang tokoh mengatakan "di Barat aku melihat Islam, tetapi tidak melihat

...melihat Islam, tapi melihat pemeluk-pemeluknya". Maka tidak mengherankan, jika dalam bertutur Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar dilindungi dari kekufuran dan kemunafikan (HR. al Hakim dan al Baihaqi).

...adalah keduanya mempunyai tingkat yang sama-sama seperti disebutkan hadist lain. Pemerintahan bersih (*clean governance*) merupakan dasar tersosialisasikan moral ekonomi. "Lembudayakan etika ekonomi yang mencakup kepentingan semua pelakunya, jelas membatasi campur tangan kekuasaan. Dan campur tangan kekuasaan tentu tidak akan efektif tanpa adanya sikap konsisten dan contoh konkrit dari para penguasa. Bukan berarti setiap pejabat harus jadi "orang suci", sebab di manapun tindak korupsi, kolusi dan nepotisme tetap ada, meskipun bertentangan sekalipun dari suatu negeri ke negeri lain. Yang penting ialah para pelaku penyelewengan tidak dapat bertindak tanpa pandang belu. Juga bukan berarti tegak dan merosotnya moral ekonomi boleh dikata sama dengan menyapu dan membersihkan perilaku ekonomi yang tidak atau kurang etis. Dan di manapun pekerjaan "membersihkan" tentu dimulai dari atas dan bertangur-angsur menuju ke bawah. Sebuah hadist mengatakan "*an nasu 'ala dini mulukihim*" (manusia akan mengikuti agama atau tata cara para rajanya). Sehingga, dari dahulu sampai sekarang *clean government* merupakan tonggak utama bagi terciptanya masyarakat yang tegak dan peduli terhadap moral sosial ekonomi.

### Menuju Sosialisasi Ekonomi Islam

Hasil poling yang berhasil dirangkum oleh penulis mengemukakan sebuah fakta yang mungkin tidak terlalu mengherankan. Mayoritas masyarakat ternyata belum pernah tahu, apa itu ekonomi Islam, yang biasa disimplifikasi menjadi sebatas bank-bank syariah dan BMT. Bahkan banyak di

antara mereka yang baru pertama kali mendengarkan tentang bank syariah atau pun BMT.

Poling dilakukan secara random terhadap 100 responden. Sebagian besar responden adalah pengusaha kecil dan menengah. Kami mengambil sample pada daerah sekitar Dinoyo, Arjosari, Kayutangan dan Alun-alun kota Malang. Tingkat kesalahan mencapai 7%.

Poling ini bertujuan untuk membuktikan keefektifan penerapan ekonomi Islam (setidaknya untuk saat ini). Kami dapat menilai efektif, ketika informasi tentang sistem ini diketahui secara luas dan ilmiah. Tatkala masyarakat memilih ekonomi Islam dan bank-bank syariah, karena sadar akan nilai lebihnya, maka kita dapat berharap banyak dari sistem ekonomi ini di masa datang.

Adapun alasan dari responden mengenai pentingnya Lembaga Keuangan Umum (LKU) adalah lembaga keuangan Islam belum dimengerti oleh sebagian besar masyarakat awam. Sedangkan alasan dari responden yang menghendaki adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah banyaknya bank umum yang kolaps dan bank-bank syariah tidak menawarkan bunga.

Dari hasil poling tersebut, bank-bank syariah jelas-jelas belum tersosialisasikan secara optimal. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sejarah perekonomian Indonesia rakyat selalu dimarginalkan. Kondisi inilah yang sebenarnya melingkupi kita dan senantiasa membuat kita gelisah. Bahkan, mungkin hal inilah yang menjadi dialektika sistem yang akhir-akhir ini, oleh sebagian orang diyakini mempunyai "kesaktian" untuk mampu mensejahterakan rakyat.

Tetapi realita ternyata masih membutuhkan beberapa penyikapan. Tidak tersosialisasikan sistem ini secara optimal dan sangat sektoral (hanya pada komunitas Muslim), menyebabkan pemahaman terhadap konsep perekonomian ini jauh dari kaidah-kaidah ilmu, bahkan hanya akan menguatkan potensi-potensi primodialisme.

Tabel I

Pertanyaan	Pernah	Tidak Pernah
Pernahkah anda mendengar tentang istilah lembaga keuangan Islam, seperti Bank Syari'ah, BMT, dll.?	40,74 %	59,26 %

Pertanyaan	Perlu	Tidak Perlu	Tidak Tahu
Apakah lembaga keuangan konvensional (bank-bank umum) masih diperlukan?	66,67 %	14,81 %	18,52 %

Pertanyaan	LKU *	LKS **	Tidak Tahu
Manakah yang lebih baik di antara keduanya?	40,74 %	33,33 %	25,90 %

\* LKU: Lembaga Keuangan Umum

\*\* LKS: Lembaga Keuangan Syariah

Selain itu, ditambah dengan mencengkramnya sistem-sistem ekonomi konvensional, di mana tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi. Demikian survey yang dilakukan lembaga pengembangan ekonomi Universitas Indonesia.

Menyimak dari uraian diatas dapat kita berkesimpulan bahwa lembaga-lembaga keuangan Islam ini terlepas dari maksud baik pendiriannya, lebih kental simbolisasi ke-Islamannya daripada kemampuan lembaga-lembaga itu mengangkat taraf hidup umat. Dan usaha untuk mensosialisasikan keberadaan lembaga ini beserta kelebihanannya pun sangat terbatas pada komunitas Muslim dan pola yang diterapkan khawatir hanya memperkuat simbolisasi Islam.

Tabel II

Poin	Daerah			DKI Jakarta		
	Tahu	Tidak Tahu	Abstain	Tahu	Tidak Tahu	Abstain
Pengetahuan ttg Bank Syariah	56,2 %	31,8 %	2,05 %	75,0 %	25,0 %	---

Poin	Daerah			DKI Jakarta		
	Halal	Haram	Ragu-Ragu	Halal	Haram	Ragu-Ragu
Persepsi ttg bunga bank	45,0 %	06,2 %	37,2 %	65,0 %	15,0 %	31,6 %

**Penutup**

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menciptakan rancang bangun teori ekonomi Islam, sebenarnya merupakan pekerjaan yang teramat berat. Satu hal yang harus disadari bersama adalah bahwa sebuah Islamisasi ekonomi, pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan munculnya Islamisasi pengetahuan selama beberapa dasa warsa terakhir ini. Karena jelas, bahwa ilmu ekonomi modern yang saat ini mendominasi hampir seluruh dimensi praktek perekonomian dunia adalah bagian integral dari ilmu pengetahuan.

Islamisasi ekonomi sebenarnya harus dimulai dengan sebuah pertanyaan mendasar: Apakah ilmu pengetahuan (termasuk ilmu ekonomi)

perbedaan moral dan etika yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai nilai yang sama. Jujur adalah tindakan terpuji dan curang adalah tindakan tercela, baik hal ini dilakukan dalam dunia bisnis, politik atau permainan sepak bola. Tapi, barangkali perlu diperhatikan bahwa komitmen seseorang untuk menegakkan moral dalam kehidupan ekonomi akan terasa berat daripada ketika ia bertindak sebagai pelaku ekonomi. Sehingga, dalam satu cabang kehidupan ini nilai-nilai moral sulit untuk tersosialisasikan.

Setidaknya ada tiga penyebab penting dalam hal ini. *Pertama*, kesenjangan antara sistem ekonomi yang berlaku dengan norma-norma agama yang diyakini masyarakat Muslim. Ekonomi pasar yang mendominasi saat ini adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada falsafah kebebasan individu, yang dalam tingkat masyarakat diaplikasikan menjadi nilai-nilai dasar demo-

Islamisasi ekonomi sebenarnya harus dimulai dengan sebuah pertanyaan mendasar: Apakah ilmu pengetahuan (termasuk ilmu ekonomi) bebas nilai ataukah tidak? Pertanyaan ini menjadi penting karena jawaban "ya" dan "tidak" sama-sama mengandung konsekuensi

krasi. Karena itu, teori-teori dirumuskan tidak terlepas dari rasionitas individu yang bebas untuk menafsirkan segala hal. Perilaku ekonomi apapun dianggap syah dan legal selama tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan dan etika demokrasi. Sementara pada masyarakat Muslim berlaku nilai-nilai yang tidak berasaskan kebebasan, melainkan berpijak pada akidah dan konsep dasar manusia atau harta. Sehingga, kadang-kadang harus dikorbankan, karena tuntutan akidah dan konsep dasar tadi. Lebih dari itu, Islam menganggap bahwa mengorbankan kebebasan demi perintah Tuhan adalah kebebasan yang sejati, karena hanya patuh pada Tuhannya dan tidak mematuhi atau dikendalikan hawa nafsunya. □

Apakah ilmu pengetahuan bebas nilai? Pertanyaan ini menjadi penting karena jawaban "ya" dan "tidak" sama-sama mengandung konsekuensi. Jika kita percaya pada teori yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, maka Islamisasi ekonomi sebenarnya terjadi pada wilayah aksiologis. Karena menurut teori ini bahwa sekapitalis apapun teori ekonomi itu, jika dipraktekkan oleh pribadi-pribadi muslim, maka dengan sendirinya akan mematuhi ekonomi Islam. Pandangan seperti ini tampaknya terlalu simplistis dan menganggap ilmu pengetahuan sebagai sebuah "barang mati" yang tidak mengandung nilai. Padahal lahirnya suatu konsep pengetahuan sama sekali tidak terlepas dari konstruksi nilai yang berlangsung di tengah masyarakat. Dalam sosiologi pengetahuan, teori Hegel seringkali diturunkan untuk mempertajam analisis ini, bahwa sebuah pengetahuan terbentuk karena adanya proses dialektika yang melibatkan tesis-antitesis-sintesis. Dengan kata lain, paradigma berfikir Hegelian, menyepakati bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai.

Semua aspek kehidupan yang diwarnai oleh unsur moral dan etika itulah yang dikehendaki oleh ajaran-ajaran agama. Ekonomi bermoral, kebudayaan bermoral, politik bermoral bahkan perang pun tidak lepas dari muatan-muatan nilai moralitas. Agama juga telah memasukkan nilai-nilai tertentu ke dalam etika ekonomi secara khusus. Semisal, anggapan kotor (*khabits*) terhadap jenis makanan atau barang tertentu sehingga tidak boleh diproduksi, dikonsumsi atau dijualbelikan. Namun, secara umum tidak ada

KEPUSTAKAAN

Esack, Farid. 1997. *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*. Oxford: Oneworld Publication.

Esposito, John L. 2001. *Maker of Contemporary Islam* (terj. Sugeng Hariyanto, dkk). Jakarta: Murai Kencana.

Hasbullah, Moeflich (ed). 2000. *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LSAF.

Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (terj. M. Sadat Ismail). Yogyakarta: Penerbit Qalam.

Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.

\_\_\_\_\_. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.

\_\_\_\_\_. 2001. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan.

Prasentiantono, A. Tony. 2000. dalam *Nasionalisme Etnisitas, Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan*, (Ed. Th. Sumartana, dkk), Yogyakarta: DIAN Interfidei.

Przeworski, Adam. 1997. *Sustainable Democracy*. Chicago: Chicago University Press.

Rahardjo, Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: LSAF.

Tibi, Bassam. 1998. *The Challenge of Fundamentalism, Political Islam and New World Disorder*. London: University of California Press.

Majalah *DIMEK*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, 2000.

**TEMA JURNAL BESTARI EDISI NO. 35 - THN.XVI, 2003**

Redaksi Jurnal Bestari mengundang para pembaca; dosen, mahasiswa, dan khalayak umum (ahli di bidangnya) untuk mengirimkan gagasannya dalam bentuk artikel ilmiah populer pada edisi No.35 -Thn. XVI, 2003, dengan tema sentral:

***“Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam Berbasis Pengembangan dan Rekayasa Sains dan Teknologi”***

Judul artikel bebas, diketik 2 spasi, minimal 15 halaman kuarto, disertai Abstraksi, Daftar Pustaka (bila mungkin catatan akhir), dan biodata penulis. Naskah dikirim dalam bentuk copy keras (*print-out*) beserta disket (program MS, ext. RTF), dan kami tunggu paling lambat tanggal 28 Februari 2003.

